BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian dari mayoritas penduduknya. Dengan demikian, sebagian besar penduduknya menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Kenyataan yang terjadi bahwa sebagian besar penggunaan lahan di wilayah Indonesia diperuntukkan sebagai lahan pertanian. Keadaan seperti ini menuntut kebijakan sektor pertanian yang disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan yang terjadi di lapangan dalam mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut kesejahteraan bangsa (Dillon dkk, 2009:23).

Paradigma pembangunan di Indonesia selama ini yang dominan dalam pembangunan adalah suatu paradigma yang meletakkan peran pemerintah pada posisi sentris. Baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan pembangunan. Dan paradigma ini mendapat banyak kecaman dari berbagai pihak, karena paradigma tersebut sangat tidak mempercayai kemampuan masyarakat dalam membangun diri. Sehingga banyak proyek dan program pembangunan yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat, karena tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat (Jacob, 2000 dalam Sukino, 2014:59). Pembangunan pertanian yang berpusat pada masyarakat harusnya akan meningkatkan perekonomian masyarakat karena disana masyarakat bebas untuk mengatur peraturan dan melakukan berbagai program pemerintah berbasis kebutuhan masyarakat itu sendiri. Cara agar program pemerintah tersebut supaya selaras dengan kebutuhan masyarakat adalah dengan keikutsertaan masyarakat. Keikutsertaan masyarakat diharapkan mampu membuat masyarakat dapat memandirikan diri mereka sendiri (Kartasasmita, 1996 dalam Amanah, 2014:17).

Pada negeri yang besar seperti Indonesia dan dengan kompleksitas persoalannya, dimensi modal sosial hampir diabaikan, jauh berada di luar alam pikir pembangunan. Padahal, di berbagai belahan dunia dewasa ini, kesadaran akan pentingnya faktor tersebut cukup tinggi, dan sedang menjadi kepedulian bersama. Social capital (modal sosial) diyakini sebagai salah satu komponen

utama dalam menggerakkan kebersamaan, mobilitas ide, kesaling percayaan dan kesaling menguntungkan untuk mencapai kemajuan bersama (Hasbullah, 2006:3). Modal sosial dapat didefinisikan sebagai serangkaian nilai dan norma informal yang dimiliki bersama diantara para anggota suatu kelompok masyarakat yang memungkinkan terjadinya kerjasama di antara mereka (Fukuyama, 1999 dalam Ulinnuha, 2012:28). Modal sosial berbeda dengan istilah modal manusia (human capital). Pada modal manusia segala sesuatunya lebih merujuk kepada dimensi individual yaitu daya dan keahlian yang dimiliki individu. Modal sosial tidak dibangun hanya oleh satu individu, melainkan akan terletak pada kecenderungan yang tumbuh dalam suatu kelompok untuk bersosialisasi sebagai bagian penting dari nilai-nilai yang melekat. Modal sosial akan kuat tergantung pada kapasitas yang ada dalam kelompok masyarakat untuk membangun sejumlah asosiasi membangun jaringannya.

Salah satu kumci keberhasilan membangun modal sosial terletak pada kemampuan sekelompok orang dalam suatu asosiasi atau perkumpulan dalam melibatkan diri dalam suatu hubungan sosial (Hasbullah, 2006:7). Kelompok merupakan salah satu inti dari konsep modal sosial. Kecenderungan suatu entitas sosial dengan masyarakatnya untuk membentuk perkumpulan-perkumpulan akan sangat menentukan kuat atau tidaknya modal sosial mereka. Gerakan-gerakan sosial yang terorganisir dalam suatu grup atau perkumpulan dengan maksud mensejahterakan dan memberi keuntungan bagi anggotanya akan menentukan kecepatan perkembangan masyarakat dimana perkumpulan itu tumbuh. Kajian-kajian yang menyangkut modal sosial selama ini cenderung memperlihatkan bahwa semakin aktif masyarakat terlibat dalam suatu perkumpulan, dan semakin banyak perkumpulan atau kelompok sosial yang ada akan memberikan dampak positif di tengah masyarakat tersebut dan juga akan memberi pengaruh positif pada dunia di luarnya (Hasbullah, 2006:34).

Banyak kelompok yang dilahirkan di tengah masyarakat ataupun merupakan program dari pemerintah lahir dengan bertujuan untuk memberi keuntungan kolektif bagi kelompok dan memudahkan bagi pemerintah dalam melihat ke bawah terkait petani yang sudah dikelompokkan. Kelompok tersebut dalam kegiatan pertanian sehari-hari dapat kita lihat dalam berbagai aktivitas usahatani, yaitu kelompok yang saling membantu dalam bidang penyiapan sarana dan prasarana dalam usahatani, melakukan kelembagaan dalam

budidaya, kelompok dalam pengolahan hasil pertanian, bahkan kelompok yang membentuk sebuah kelembagaan untuk memudahkan dalam aspek pemasaran sehingga mereka dapat menjamin harga produk pertanian yang mereka hasilkan agar tidak berada di bawah harga pasar.

Semua kelompok itu didirikan tentu atas dasar mencari kesejahteraan bagi kelompok, yang nanti keuntungannya tentu juga akan mereka terima secara personal untuk rumah tangga mereka masing-masing. Salah satu dari kelompok tersebut adalah adanya perkumpulan petani pemakai air (P3A). Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) merupakan kelompok yang ada di masyarakat dimana anggotanya adalah petani yang memanfaatkan air sebagai sarana pengairan sawah mereka. P3A dibentuk untuk memfasilitasi dan mengatur pembagian air bagi petani dimana pembentukannya berdasarkan pada luasan areal sawah dan di daerah irigasi setempat. Prinsipnya organisasi ini sudah ada sejak air irigasi mulai menjagi bagian dari kehidupan pertanian. Pada mulanya organisasi seperti ini terkait erat dengan lembaga pemerintah desa sebagi pusat pengatur kegiatan masyarakat desa, yang dalam perkembangananya organisasi ini sudah ada sejak lama secara tradisional dan mengakar pada kehidupan masyarakat (Kartasapoetra dkk, 1994:173).

Pengelolaan sistem irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab dari Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Artinya, segala tanggung jawab pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di tingkat tersier menjadi tanggung jawab lembaga perkumpulan petani pemakai air termasuk perkumpulan petani pemakai air (P3A) yang ada di Kecamatan Limboto. Dalam penglolaan irigasi, Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang ada diKecamatan Limboto belum secara optimal melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Dari hasil pengamatan awal penulis bahwa tampak pengelolaan jaringan irigasi di Kecamatan Limboto memiliki beberapa permasalahan. Dalam kegiatan operasi jaringan, terkadang Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) tidak menjalankan tanggungjawabnya dengan semestinya, sehingga pembagian air tidak merata. Dalam kegiatan pemeliharaan jaringan, biasanya daerah hulu saja yang mendapatkan perhatian petugas, sedangkan bagian tengah dan hilir diserahkan tidak begitu mendapat perhatian, hal ini menyebabkan rendahnya motivasi kerja dan kurangnya kemampuan dalam pemeliharaan jaringan irigasi.

Dalam kegiatan rehabilitasi jaringan, masih kurangnya kesadaran P3A terhadap irigasi yang mengalami kerusakan. Dalam mengelola jaringan irigasi tersier, yang sepenuhnya kewenangan menjadi milik P3A, tentu saja modal sosial menjadi bagian yang sangat penting. Hal ini karena P3A merupakan salah satu komunitas/kelompok yang berada di masyarakat, sehingga penting untuk dikaji, serta modal sosial menjadi perekat bagi P3A dalam mengelola jaringan irigasi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul yakni "Efektivitas Pengelolaan Irigasi oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo"

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka adapun identifikasi masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut;

1. Masih kurangnya sember daya pengelolaan
2. Belum maksimalnya pemeliharaan jaringan irigasi
3. Sistem perencanaan jaringan irigasi yang belum merata antara hulu, tengah dan hilir di daerah pertanian Kecamatan Limboto

1.3. Fokus Masalah

Adapun fokus masalah penelitian ini disesuaikan dengan latarbelakang dan identifikasi masalah sebelumnya yaitu; Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Irigasi oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Pengelolaan Irigasi oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pencarian informasi terutama yang berkaitan dengan pengelolaan irigasi oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) atau menjadi acuan pada penelitian-penelitian di bidang sama di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini, diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran serta informasi bagi Pemerintah setempat khususnya Pemerintah Kota Gorontalo dalam hal ini Dinas terkait.